

BULAN : JANUARI, FEBRUARI, MARET 2022

---

2  
0  
2  
2

MONITORING

EVALUASI

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

---

BTKLPP KELAS I BATAM

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP)  
KELAS I BATAM**

**A. LATAR BELAKANG**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi pertahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik. Merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan Informasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, khususnya di Satker BTKLPP Kelas I Batam. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi public secara cepat, tepat waktu dan sederhana.

Salah satu fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standart layanan informasi di lingkungan PPID BTKLPP Kelas I Batam, dengan adanya SOP Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU Nomor 14 Tahun 2010 tentang KIP dapat berjalan dengan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357)

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 615)
6. Peraturan Menkes RI Nomor 2166/Menkes/Per/2011 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 706)
7. Peraturan MenPAN dan RB RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 615)
8. Peraturan Menkes RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 36)
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 429)

### **C. TUJUAN**

Tujuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi adalah :

1. Mendorong terwujudnya implementasi UU Nomor 14 Tahun 2020 tentang KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
2. Memberikan standar bagi PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
3. Meningkatkan pelayanan informasi publik yang berkualitas.

### **D. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI**

#### 1. Pelaksana

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di BTKLPP Kelas I Batam melibatkan seluruh pegawai yang melakukan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang menjadi output BTKLPP Kelas I Batam serta Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang sudah dibentuk sesuai Keputusan Kepala Kantor BTKLPP Kelas I Batam tanggal 7 Februari 2022 yang terdiri dari :

- a. Pelaksana : Kepala BTKLPP Kelas I Batam
- b. Pembantu
  - 1) Ka. Sub Bag ADUM
  - 2) Koordinator Substansi SE
  - 3) Koordinator Substansi PTL
  - 4) Koordinator Substansi ADKL
- c. Koordinator Pelayanan Informasi
  - 1) Sri Handayani, S.Si, M.Sc
  - 2) Tengku Yuliarni,
- d. Koordinator Pelayanan Dokumentasi
  - 1) Zulhaida, SE, M.Si

- 2) Syaiful Bahri Hasibuan
- e. Pelayanan Informasi
  - 1) Ulfatun Makmonah, SE
  - 2) Susiansyah
  - 3) Ning Gusti Ramadiani
  - 4) Yuni Rahmasari
- f. Petugas Dokumentasi
  - 1) M. Afif Zayan
  - 2) Indra Aidil
  - 3) Nur Wahono
- 2. Hasil Monitoring dan Evaluasi  
Terlampir
- 3. Rencana Tindak Lanjut

Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.

Batam, Maret 2022  
Ketua Pokja 2  
  
Indra, SKM



**MONITORING DAN EVALUASI  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BTKLPP KELAS I BATAM  
TAHUN 2022**

NO	KLASIFIKASI	URAIAN
1	<b>Pelayanan Informasi Publik:</b>	<p><b>Total:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 60 permintaan oleh seluruh <i>Customers</i>/pelanggan terhitung mulai awal Januari sampai Maret Tahun 2022.</li> <li>2. 60 <i>Customers</i>/ pelanggan terhitung telah melakukan permintaan pengujian sampel di BTKLPP Kelas I Batam</li> </ol>
	a) Permintaan informasi	:
	- Jumlah permohonan yang dikabulkan sebagian.	:
	- Jumlah permohonan yang dikabulkan seluruhnya.	:
	b) Pengaduan masyarakat.	:
	c) Keberatan atas informasi.	:
	d) Waktu Pemenuhan tiap Pemohon.	:
2	<b>Mayoritas Jenis/Topik:</b>	
	a) Permintaan Informasi	:

NO	KLASIFIKASI	URAIAN
		<p>Kepri.</p> <p>b) Pengaduan Masyarakat : - <b>Laboratorium Faktor Resiko Lingkungan</b> Saran dan masukan yang diterima sepenuhnya bersifat positif mengenai bagaimana upaya Laboratorium BTKLPP Kelas I Batam untuk meningkatkan kualitas mutu layanan seperti kecepatan proses pengujian dan ketepatan distribusi Hasil Pengujian.</p> <p>- <b>Laboratorium Penyakit</b> (Pemeriksaan Covid- 19) a) Belum ada pengaduan <i>customer/</i> pelanggan mengenai persyaratan dan administrasi teknis pemeriksaan Covid-19 yang diterima oleh Tim Pelayanan.</p> <p>c) Keberatan atas Informasi : Tidak Ada</p>
3.	<p><b>Permintaan Informasi, Pengaduan Masyarakat dan Keberatan atas Informasi yang Masih Dalam Proses:</b></p> <p>a) Permintaan Informasi : -</p> <p>b) Pengaduan Masyarakat : -</p> <p>c) Keberatan atas Informasi : -</p> <p><b><u>ISI KEBERATAN:</u></b> Terlampir</p> <p><b><u>TANGGAPAN BTKL</u></b></p>	
4.	<p><b>TANTANGAN :</b></p> <p>Beberapa pelanggan meminta pelayanan yang cepat dan akurat terkait penawaran harga sebagai jawaban surat permohonan permintaan pengujian yang disampaikan.</p>	

BULAN : APRIL, MEI, JUNI 2022

---

2  
0  
2  
2

MONITORING

EVALUASI

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

---

BTKLPP KELAS I BATAM

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP)  
KELAS I BATAM**

**A. LATAR BELAKANG**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi pertahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik. Merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan Informasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, khususnya di Satker BTKLPP Kelas I Batam. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi public secara cepat, tepat waktu dan sederhana.

Salah satu fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standart layanan informasi di lingkungan PPID BTKLPP Kelas I Batam, dengan adanya SOP Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU Nomor 14 Tahun 2010 tentang KIP dapat berjalan dengan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357)

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 615)
6. Peraturan Menkes RI Nomor 2166/Menkes/Per/2011 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 706)
7. Peraturan MenPAN dan RB RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 615)
8. Peraturan Menkes RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 36)
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 429)

### **C. TUJUAN**

Tujuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi adalah :

1. Mendorong terwujudnya implementasi UU Nomor 14 Tahun 2020 tentang KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
2. Memberikan standar bagi PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
3. Meningkatkan pelayanan informasi publik yang berkualitas.

### **D. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI**

#### 1. Pelaksana

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di BTKLPP Kelas I Batam melibatkan seluruh pegawai yang melakukan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang menjadi output BTKLPP Kelas I Batam serta Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang sudah dibentuk sesuai Keputusan Kepala Kantor BTKLPP Kelas I Batam tanggal 7 Februari 2022 yang terdiri dari :

- a. Pelaksana : Kepala BTKLPP Kelas I Batam
- b. Pembantu
  - 1) Ka. Sub Bag ADUM
  - 2) Koordinator Substansi SE
  - 3) Koordinator Substansi PTL
  - 4) Koordinator Substansi ADKL
- c. Koordinator Pelayanan Informasi
  - 1) Sri Handayani, S.Si, M.Sc
  - 2) Tengku Yuliarni,
- d. Koordinator Pelayanan Dokumentasi
  - 1) Zulhaida, SE, M.Si

- 2) Syaiful Bahri Hasibuan
- e. Pelayanan Informasi
  - 1) Ulfatun Makmonah, SE
  - 2) Susiansyah
  - 3) Ning Gustu Ramadiani
  - 4) Yuni Rahmasari
- f. Petugas Dokumentasi
  - 1) M. Afif Zayan
  - 2) Indra Aidil
  - 3) Nur Wahono
2. Hasil Monitoring dan Evaluasi  
Terlampir
3. Rencana Tindak Lanjut

Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.

Batam, Juni 2022  
Ketua Pokja 2  
  
Indra, SKM



**MONITORING DAN EVALUASI  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BTKLPP KELAS I BATAM  
TAHUN 2022**

NO	KLASIFIKASI	URAIAN
1	<b>Pelayanan Informasi Publik:</b>  a) Permintaan informasi  - Jumlah permohonan yang dikabulkan sebagian.  - Jumlah permohonan yang dikabulkan seluruhnya.  b) Pengaduan masyarakat.  c) Keberatan atas informasi.  d) Waktu Pemenuhan tiap Pemohon.	<b>Total:</b> 1. 55 permintaan oleh seluruh <i>Customers</i> /pelanggan terhitung mulai awal April sampai Juni 2022. 2. 55 <i>Customers</i> / pelanggan terhitung telah melakukan permintaan pengujian sampel di BTKLPP Kelas I Batam  :  : -  : Terdapat 27 <i>customer</i> / pelanggan (Pengambilan sampel dilaksanakan sesuai kesepakatan yang telah disetujui).  : Tidak ada pengaduan.  : Tidak ada  : Permintaan pemeriksaan sampel kualitas lingkungan mengalami peningkatan pada awal tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021. Total pemenuhan pelayanan dari bulan April s.d Juni Tahun 2022 telah dilakukan pengujian sebanyak 715 sampel untuk laboratorium Faktor Risiko Lingkungan
2	<b>Mayoritas Jenis/Topik:</b>  a) Permintaan Informasi	: - Meminta informasi tentang pelayanan faktor resiko lingkungan yang terkait dengan parameter yang bisa diperiksa di laboratorium BTKLPP Kelas I Batam.

NO	KLASIFIKASI	URAIAN
		<p data-bbox="807 267 884 297">Kepri.</p> <p data-bbox="347 358 699 387">b) Pengaduan Masyarakat :</p> <p data-bbox="807 358 1417 625">- <b>Laboratorium Faktor Resiko Lingkungan</b> Saran dan masukan yang diterima sepenuhnya bersifat positif mengenai bagaimana upaya Laboratorium BTKLPP Kelas I Batam untuk meningkatkan kualitas mutu layanan seperti kecepatan proses pengujian dan ketepatan distribusi Hasil Pengujian.</p> <p data-bbox="807 666 1342 739">- <b>Laboratorium Penyakit</b> (Pemeriksaan Covid- 19)</p> <p data-bbox="815 743 1422 891">a) Belum ada pengaduan <i>customer/</i> pelanggan mengenai persyaratan dan administrasi teknis pemeriksaan Covid-19 yang diterima oleh Tim Pelayanan.</p> <p data-bbox="347 943 715 972">c) Keberatan atas Informasi :</p> <p data-bbox="807 943 1422 1084">Keberatan atas hasil pengujian timbal (Pb) yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021</p>
3	<p data-bbox="347 1168 1273 1240"><b>Permintaan Informasi, Pengaduan Masyarakat dan Keberatan atas Informasi yang Masih Dalam Proses:</b></p> <p data-bbox="347 1261 667 1290">a) Permintaan Informasi :</p> <p data-bbox="347 1317 699 1347">b) Pengaduan Masyarakat :</p> <p data-bbox="347 1374 715 1403">c) Keberatan atas Informasi :</p>	<p data-bbox="815 1261 826 1290">-</p> <p data-bbox="815 1317 826 1347">-</p> <p data-bbox="815 1374 826 1403">-</p> <p data-bbox="427 1424 715 1560"><b><u>ISI KEBERATAN:</u></b> Terlampir <b><u>TANGGAPAN BTKL</u></b></p>
4.		<p data-bbox="347 1635 560 1664"><b>TANTANGAN :</b></p> <p data-bbox="347 1669 1430 1771">Beberapa pelanggan meminta pelayanan yang cepat dan akurat terkait penawaran harga sebagai jawaban surat permohonan permintaan pengujian yang disampaikan.</p>

BULAN : JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER 2022

---

2  
0  
2  
2

MONITORING

EVALUASI

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

---

BTKLPP KELAS I BATAM

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP)  
KELAS I BATAM**

**A. LATAR BELAKANG**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi pertahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik. Merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan Informasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, khususnya di Satker BTKLPP Kelas I Batam. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi public secara cepat, tepat waktu dan sederhana.

Salah satu fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standart layanan informasi di lingkungan PPID BTKLPP Kelas I Batam, dengan adanya SOP Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU Nomor 14 Tahun 2010 tentang KIP dapat berjalan dengan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357)

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 615)
6. Peraturan Menkes RI Nomor 2166/Menkes/Per/2011 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 706)
7. Peraturan MenPAN dan RB RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 615)
8. Peraturan Menkes RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 36)
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 429)

### **C. TUJUAN**

Tujuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi adalah :

1. Mendorong terwujudnya implementasi UU Nomor 14 Tahun 2020 tentang KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
2. Memberikan standar bagi PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
3. Meningkatkan pelayanan informasi publik yang berkualitas.

### **D. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI**

#### **1. Pelaksana**

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di BTKLPP Kelas I Batam melibatkan seluruh pegawai yang melakukan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang menjadi output BTKLPP Kelas I Batam serta Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang sudah dibentuk sesuai Keputusan Kepala Kantor BTKLPP Kelas I Batam tanggal 7 Februari 2022 yang terdiri dari :

- a. Pelaksana : Kepala BTKLPP Kelas I Batam
- b. Pembantu
  - 1) Ka. Sub Bag ADUM
  - 2) Koordinator Substansi SE
  - 3) Koordinator Substansi PTL
  - 4) Koordinator Substansi ADKL
- c. Koordinator Pelayanan Informasi
  - 1) Sri Handayani, S.Si, M.Sc
  - 2) Tengku Yuliarni,
- d. Koordinator Pelayanan Dokumentasi
  - 1) Zulhaida, SE, M.Si

- 2) Syaiful Bahri Hasibuan
- e. Pelayanan Informasi
  - 1) Ulfatun Makmonah, SE
  - 2) Susiansyah
  - 3) Ning Gustu Ramadiani
  - 4) Yuni Rahmasari
- f. Petugas Dokumentasi
  - 1) M. Afif Zayan
  - 2) Indra Aidil
  - 3) Nur Wahono
2. Hasil Monitoring dan Evaluasi  
Terlampir
3. Rencana Tindak Lanjut

Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.

Batam, September 2022  
Ketua Pokja 2  
  
Indra, SKM



**MONITORING DAN EVALUASI  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BTKLPP KELAS I BATAM  
TAHUN 2022**

NO	KLASIFIKASI	URAIAN
1	<b>Pelayanan Informasi Publik:</b>  a) Permintaan informasi  - Jumlah permohonan yang dikabulkan sebagian.  - Jumlah permohonan yang dikabulkan seluruhnya.  b) Pengaduan masyarakat.  c) Keberatan atas informasi.  d) Waktu Pemenuhan tiap Pemohon.	<b>Total:</b> 1. 59 permintaan oleh seluruh <i>Customers</i> /pelanggan terhitung mulai awal Juli sampai September Tahun 2022. 2. 59 <i>Customers</i> / pelanggan terhitung telah melakukan permintaan pengujian sampel di BTKLPP Kelas I Batam  :  : -  : Terdapat 30 <i>customer</i> / pelanggan (Pengambilan sampel dilaksanakan sesuai kesepakatan yang telah disetujui).  : Tidak ada pengaduan.  : 1 Permintaan pengkajian ulang parameter timbal (Pb) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bintan (B/807/661.21/2022)  : Permintaan pemeriksaan sampel kualitas lingkungan mengalami peningkatan pada awal tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021. Total pemenuhan pelayanan dari bulan Juli s.d September Tahun 2022 telah dilakukan pengujian sebanyak 636 sampel untuk laboratorium Faktor Risiko Lingkungan
2	<b>Mayoritas Jenis/Topik:</b>  a) Permintaan Informasi	:  : - Meminta informasi tentang pelayanan faktor resiko lingkungan yang terkait dengan parameter yang bisa diperiksa di laboratorium BTKLPP Kelas I Batam.

NO	KLASIFIKASI	URAIAN
		<p>Kepri.</p> <p>b) Pengaduan Masyarakat : - <b>Laboratorium Faktor Resiko Lingkungan</b> Saran dan masukan yang diterima sepenuhnya bersifat positif mengenai bagaimana upaya Laboratorium BTKLPP Kelas I Batam untuk meningkatkan kualitas mutu layanan seperti kecepatan proses pengujian dan ketepatan distribusi Hasil Pengujian.</p> <p>- <b>Laboratorium Penyakit</b> (Pemeriksaan Covid- 19) a) Belum ada pengaduan <i>customer/</i> pelanggan mengenai persyaratan dan administrasi teknis pemeriksaan Covid-19 yang diterima oleh Tim Pelayanan.</p> <p>c) Keberatan atas Informasi : Keberatan atas hasil pengujian timbal (Pb) yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021</p>
3	<p><b>Permintaan Informasi, Pengaduan Masyarakat dan Keberatan atas Informasi yang Masih Dalam Proses:</b></p> <p>a) Permintaan Informasi : -</p> <p>b) Pengaduan Masyarakat : -</p> <p>c) Keberatan atas Informasi : 1</p>	<p><b><u>ISI KEBERATAN:</u></b> Terlampir</p> <p><b><u>TANGGAPAN BTKL</u></b> Melakukan pengujian ulang dan mengamandemen SHU jika terdapat kekeliruan</p>
4.	<p><b>TANTANGAN :</b></p>	<p>Beberapa pelanggan meminta pelayanan yang cepat dan akurat terkait penawaran harga sebagai jawaban surat permohonan permintaan pengujian yang disampaikan.</p>